



# BPBD Minim Anggaran

**SEKADAU, SP** - Komisi III DPRD Kabupaten Sekadau, menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Raker berkaitan dengan penanganan pasca bencana alam, yang berlangsung di ruang rapat komisi DPRD Sekadau, Rabu (5/2).



**Yuhilda Harahap**  
Anggota Komisi III DPRD  
Sekadau

**Ini berkaitan dengan bencana, kita tidak tau kapan bencana itu terjadi. Dana harus stanby dan dana kita ada. Apabila dana tidak tersedia, bagaimana menanggulangi bencana.**

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi III, Hasan dan dihadiri anggota komisi III, Paulus Subarno, Muslimin, Herman, Yuhilda Harahap, dan Y Sabas.

Sebelum Raker dengan BPBD, Komisi III juga telah Raker dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sekadau, terkait dengan Program Kerja Kadisdikbu dan masalah tenaga Honoror.

Kepala Pelaksanaan (Kalaks) BPBD Kabupaten Sekadau, Matius Jon menerangkan bahwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sekadau adalah banjir dan tanah longsor.

Matius Jon menyebutkan, bahwa kejadian bencana alam terbesar di Kabupaten Sekadau diantaranya, terjadi pada 6 Desember 2019 yakni banjir bandang di Pantok dan Meragun dengan kerugian miliaran rupiah.

"Ada 11 jembatan yang rusak, jalan terputus jaringan PDAM juga rusak," kata Jon.

Selain itu itu sambungannya, juga banyak terjadi banjir di temoat lain. Dalam menanggapi itu, Matius Jon mengatakan, pihak BPBD sudah turun kelapangan, bantuan juga sudah dikirimkan.

"Terkait perbaikan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, kami tidak bisa lakukan. Karena kami tidak punya anggaran," katanya.

Mendengar keluhan pihak BPBD, anggota komisi III mempertanyakan hal tersebut. Kenapa bisa tidak punya anggaran. Padahal, anggaran untuk tanggap darurat itu ada.

"Ini berkaitan dengan bencana, kita tidak tau kapan

bencana itu terjadi. Dana harus stanby dan dana kita ada. Apabila dana tidak tersedia, bagaimana menanggulangi bencana," Yuhilda Harahap.

Namun demikian, ia meminta dalam penggunaan dana tanggap darurat ini harus berkoordinasi dengan Bupati dan pihak terkait. Paulus Subarno juga menanggapi hal ini. Terkait penggunaan anggaran supaya berkoordinasi dengan BPKAD. Subarno juga menanyakan apa program BPBD kedepan di tahun 2020 ini.

"Sehingga, jika ada yang perlu kami bantu kami sampaikan ke BBB Provinsi dan nasional," ujarnya.

Anggota lainnya, Y. Sabas memberi saran kepada pihak BPBD terkait bagaimana antisipasi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. "Bagaimana kesiapannya, itu yang sangat penting," saran Politisi PDIP itu.

Sementara itu, Herman juga mengutarakan hal yang sama dengan anggota komisi III lainnya. Herman apresiasi terhadap kinerja BPBD Selama ini.

"Walaupun penuh dengan kekurangan anggaran, namun dapat terus melakukan pelayanan terhadap masyarakat harus tetap prima dan menunjukkan kualitasnya," pungkas Politisi PAN. (akh)